

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pentingnya laporan keuangan juga diungkapkan Belkoui (1993) bahwa laporan keuangan merupakan sarana untuk mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan oleh manajer atas sumber daya pemilik. Salah satu parameter penting dalam laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah laba.

Menurut *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 1*, informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggung jawaban manajemen. Selain itu informasi laba juga membantu pemilik atau pihak lain dalam menaksir *earnings power* perusahaan di masa yang akan datang. Adanya kecenderungan lebih memperhatikan laba ini disadari oleh manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi tersebut, sehingga mendorong timbulnya perilaku menyimpang (*dysfunctional behaviour*), yang salah satu bentuknya adalah *earnings management*. Belum ada definisi yang jelas tentang *earnings management*. Masing-masing peneliti memberikan definisinya. Dechow, et.al (1996) mendefinisikan *earnings management* sebagai *earnings manipulation*, baik di dalam maupun di luar batas *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*. Scott (1997) mendefinisikan

earnings management sebagai tindakan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan dan atau nilai pasar perusahaan. Peneliti membatasi *earnings* didasarkan pada sifatnya, hal ini dikarenakan masih terdapat kerancuan mengenai terminologi *earnings* dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia. Peneliti mengasumsikan *earnings* terdiri atas laba tunai dan komponen-komponen *accruals* baik yang berada di bawah kebijakan manajemen (*discretionary*) maupun yang tidak (*nondiscretionary*).

Earnings management sebagai suatu fenomena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang menjadi pendorong timbulnya fenomena tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *earnings management*. Watt dan Zimmerman sebagaimana dikutip oleh Sugiri (1998) membagi motivasi *earnings management* menjadi 3, yaitu *bonus plan hypothesis*, *debt to equity hypothesis*, dan *political cost hypothesis*. Hipotesis *bonus plan* menyatakan bahwa manajer pada perusahaan dengan *bonus plan* cenderung untuk menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan *income* saat ini. *Debt to equity hypothesis* menyebutkan bahwa pada perusahaan yang mempunyai rasio *debt to equity* besar maka manajer perusahaan tersebut cenderung menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan pendapatan maupun laba. Adapun *political cost hypothesis* menyatakan bahwa pada perusahaan yang besar, yang kegiatan operasinya menyentuh sebagian besarmasyarakat akan cenderung untuk mengurangi laba yang dilaporkan. Dechow, et.al (1996) mengidentifikasi faktor *demand for external financing*, *insider trading*, *debt*, *bonus*, dan *governance*

structure sebagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *earnings management*. Terdapat berbagai macam *proxy* yang digunakan untuk mengukur faktor-faktor tersebut. Beberapa di antaranya adalah *leverage*, reputasi auditor, dan jumlah dewan direksi. Selain ketiga faktor di atas, penelitian ini juga menambahkan satu faktor baru, yaitu persentase saham yang ditawarkan kepada publik saat *IPO*.

1. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Dalam akuntansi, laporan keuangan dibagi menjadi empat jenis laporan yang meliputi :

a. Laporan Laba Rugi

Laporan rugi laba merupakan suatu laporan yang mengilustrasikan pencapaian keberhasilan atau kegagalan yang menimpa suatu usaha dalam jangka waktu (periode) tertentu, yang dinilai atau diukur dengan jumlah satuan uang. Rugi atau laba perusahaan dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah pendapatan dan jumlah beban selama satu periode akuntansi. Jika jumlah pendapatan lebih besar dibandingkan jumlah beban atau hutang maka perusahaan tersebut mendapatkan laba. Sebaliknya, jika jumlah pendapatan lebih kecil dari pada beban, maka usaha tersebut menderita kerugian. Dalam laporan rugi-laba harus mencakup unsur-unsur, antara lain sebagai berikut.

1) Pendapatan.

Pendapatan perusahaan selama satu periode akuntansi harus diperinci, manakah yang termasuk ke dalam pendapatan dari usaha

pokok (pendapatan operasional) dan mana yang merupakan pendapatan di luar usaha pokok (pendapatan non operasional).

2) Beban atau Biaya-biaya.

Sama halnya dengan pendapatan, beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan selama satu periode akuntansi harus diperinci mana yang termasuk beban operasional dan mana yang termasuk beban nonoperasional.

3) Saldo Rugi-Laba.

Saldo rugi-laba kita peroleh dengan cara membandingkan antara jumlah perincian pendapatan dan jumlah perincian beban atau biayabiaya. Pencatatan laporan rugi laba dapat dibuat dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

Laporan rugi-laba berbentuk *single step* atau biasa disebut bentuk langsung, merupakan bentuk laporan rugi-laba yang menggabungkan semua unsur pendapatan menjadi satu kelompok dan semua beban menjadi satu kelompok. Cara penyusunannya adalah bagian pertama merupakan perincian pendapatan baik pendapatan operasional maupun non operasional. Kemudian bagian kedua adalah perincian beban baik beban operasional maupun non operasional. Setelah itu, pada bagian ketiga adalah saldo rugi-laba yang merupakan selisih antara jumlah perincian pendapatan dan jumlah perincian beban.

Model *multiple step* disebut juga bentuk bertahap, dimana bentuk pencatatan rugi-laba untuk pendapatan dan beban dipisahkan antara

usaha operasional dan usaha non operasional. Cara penyusunannya adalah sebagai berikut pada bagian pertama merupakan perincian pendapatan operasional, lalu bagian kedua adalah perincian beban operasional. Kemudian pada bagian ketiga adalah saldo rugi-laba operasional. Bagian keempat untuk memerinci pendapatan maupun beban nonoperasional, lalu bagian terakhir untuk mencari saldo rugi-laba bersih.

b. laporan perubahan modal

merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut.

c. laporan arus kas

laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang (kas) perusahaan.

d. laporan keuangan

catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

2. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Kegiatan utama bank adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan kredit yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Manajemen sangat berperan penting dalam pengumpulan dana dan penyaluran kredit untuk mendukung tercapainya

tujuan. Dalam perekonomian modern, kehidupan masyarakat menjadi tidak asing dengan aktivitas perbankan. Perbankan merupakan bagian dari sistem keuangan yang melayani masyarakat yang surplus dana maupun masyarakat yang defisit dana. Oleh karena itu pengelolaan perbankan harus dilakukan dengan manajemen profesional, karena mengelola bank sangat berbeda dengan mengelola usaha industri. Untuk mencapai pengelolaan perbankan yang profesional maka manajemen perbankan dituntut untuk melakukan kegiatan diantaranya adalah kegiatan menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) dan jasa bank lainnya (*service*). Ketiga kegiatan tersebut harus dilakukan secara bersamaan, karena masing masing kegiatan satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga apabila salah satu kegiatan tersebut tidak dikelola secara profesional akan mengakibatkan kerugian bagi bank itu sendiri

Capital Adequacy Ratio merupakan adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Dalam arti lain CAR juga memiliki pengertian yaitu rasio kecukupan modal atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutupi kemungkinan-kemungkinan kerugian di dalam perkreditan atau dalam perdagangan surat-surat berharga (Umam, 2013: 342). *Capital Adequacy Ratio* dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Rasio}} \times 100\%$$

Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas (Irham, 2014). Rasio CAR yang harus dipenuhi bank, yaitu sebesar minimum 8% (delapan persen). Ketentuan 8% CAR sebagai kewajiban penyediaan modal minimum bank, dibagi dalam 2 bagian (IBI, 2014: 284) yaitu: yang pertama, 4% modal inti (tier 1) yang terdiri dari *shareholder equity*, *preferred*, sedangkan yang kedua 4% modal sekunder (tier 2) yang terdiri dari *subordinate debt*, *loan loss provisions*, *hybrid securities* dan *revaluation reserves*

Modal bank yang memadai akan membantu bank untuk dapat menyalurkan dana yang lebih besar kepada pihak ketiga sehingga dengan modal tersebut mampu memberikan keuntungan bagi pihak bank dari dana yang disalurkan.

1) Fungsi Modal

modal bank mempunyai tiga fungsi (D Johnson & P Johnson, 1985: 331).

- a. Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.
- b. Sebagai dasar bagi menetapkan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu individu debitur.

- c. Modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas.

2) Jenis-jenis Modal Bank

Modal ini sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, berdasarkan Surat Edaran BI (SE BI) Nomor 7/53/Dpbs tanggal 22 November 2005 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebagaimana telah diubah dengan SE Nomor 8/10/DpbS tanggal 7 Maret 2006, maka aspek permodalan bank Syariah (Idroes, 2011: 70) adalah sebagai berikut :

- a) Modal Inti (*tier 1*) Modal Inti adalah modal yang terdiri dari modal yang disetor dan cadangan -cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak
 - 1) Modal Setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. Bagi Bank milik koperasi modal setor terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.
 - 2) Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
 - 3) Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).

- 4) Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.
 - 5) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tertentu atas persetujuan.
 - 6) Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.
 - 7) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50 % sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi harus dikurangi terhadap modal inti.
 - 8) Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan. Laba ini diperhitungkan hanya 50 % sebagai modal inti. Bila tahun berjalan rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti.
 - 9) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada perusahaan tersebut.
- b) Model Pelengkap (*tier 2*)

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal (Pandia, 2012: 34). Adapun rincian modal pelengkap dapat berupa

- 1) Cadangan revaluasi aktiva, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah membuat persetujuan direktorat jenderal pajak.
 - 2) Cadangan aktiva yang diklarifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi berjalan, dengan maksud untuk menampung kemungkinan timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.
 - 3) Modal kuasi yaitu modal yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang.
 - 4) Modal pinjaman yang memenuhi kriteria BI, yaitu pinjaman yang didukung dengan instrument atau warkat.
 - 5) Pinjaman subordinasi yaitu pinjaman yang mempunyai syarat-syarat
- c) Modal pelengkap tambahan (*tier 3*)

Modal ini terdiri dari pinjaman subordinasi jangka pendek. Adapun modal pelengkap tambahan terdiri dari :

- 1) Berdasarkan prinsip *Mudharabah* atau *musyarabah*
- 2) Pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi jangka pendek
- 3) Modal pelengkap yang tidak dialokasikan untuk menutup beban modal untuk resiko kredit dan/atau beban modal untuk resiko operasional, namun memenuhi syarat sebagai modal pelengkap, dan

- 4) Bagian dari modal pelengkap level bawah yang melebihi Batasan pelengkap modal bawah.

3. *Non Performing Financing*(NPF)

Non Performing Financing (NPF) pada bank syariah yang dapat dianalogikan dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan. Menurut Kamus Bank Indonesia, *Non Performing Financing* merupakan kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet pada bank Syariah. Rasio NPF (*Non Performing Financing*) merupakan perbandingan antara total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada pemilik dana. Pratiwi dan Mahfud (2012) berpendapat bahwa semakin tinggi rasio NPF maka semakin buruk kualitas pembiayaan yang pada akhirnya akan mengakibatkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin tinggi.

Non Performing Financing menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah di bawah 5 persen, jika nilai NPF diatas 5 persen maka dapat dikatakan tidak sehat karena semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalahpun semakin besar. Pembiayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain (Fakhrudin & Purwanti, 3).

Pembiayaan pada NPF dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Non Performing Financing Gross* (NPF Gross)

Adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{NPF Gross} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet dan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (belum dikurangi CKPN).

2. *Non Performing Financing Net* (NPF Net)

Adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPIP) terhadap total kredit dengan formula sebagai berikut :

$$\text{NPF Net} = \frac{\text{Pemb bermasalah} - \text{CKPN Pemb bermasalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) adalah cadangan yang wajib dibentuk bank sesuai ketentuan dalam PSAK mengenai instrument keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam

menentukan kualitas pembiayaan adalah waktu pembayaran bagi hasil dan angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci atas:

1. Pembiayaan lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang dapat digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Pembiayaan angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif
- c) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai.

2. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga bagi hasil yang belum dapat melampaui sembilan puluh hari
- b) Kadang-kadang terjadi cerukan
- c) Mutasi rekening relatif aktif
- d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- e) Didukung oleh pinjaman baru

3. Kurang Lancar (*Substandart*)

Pembiayaan yang digolongkan pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga bagi hasil
- b) Sering terjadi cerukan
- c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah

- d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari Sembilan puluh hari
- e) Terdapat indikasimasalah keuangan yang dihadapi debitur.
- f) Dokumentasi pinjaman yang lemah

4. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat angsuran pokok dan/atau bunga
- b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d) Terjadi kapitalisasi bunga
- e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

3. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Penilaian kinerja bank syariah sebagai lembaga intermediasi, dapat menggunakan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, yaitu perbandingan antara

pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank dan modal bank yang bersangkutan. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid disbanding dengan bank yang mempunyai

angka rasio lebih kecil. *Financing to Deposit Ratio* dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{FDR} = \frac{\text{pembiayaan}}{\text{dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, bank yang dianggap sehat apabila FDR-nya antara 85%–110%. Pada gilirannya bahwa semakin besar dana yang disalurkan pada masyarakat maka akan memberikan kesempatan yang besar kepada bank untuk menuai keuntungan yang besar, walaupun langkah tersebut mengandung resiko yang besar yaitu berupa resiko kredit. Kebutuhan likuiditas setiap bank berbeda-beda tergantung antara lain pada kekhususan usaha bank, besarnya bank dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk menilai cukup tidaknya likuiditas suatu bank dengan menggunakan salah satunya FDR perlu diteliti apakah bank telah memperhitungkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kewajibannya, misalnya memenuhi *commitment loan*, antisipasi atas pemberian jaminan bank yang pada gilirannya akan menjadi kewajiban bagi bank dan sebagainya. Hasil pengukuran tadi kemudian dibandingkan dengan target dan

limit likuiditas yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan diketahui apakah bank mengalami kesulitan likuiditas ataukah kelebihan likuiditas.

2.1.2 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu tahun tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya (Salman, 2012:30). Laporan keuangan bank merupakan bentuk pertanggung jawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu. Tujuan laporan keuangan bank adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

1. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja (*performing measurement*) adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain.

Munawir kinerja keuangan memiliki empat tujuan, tujuan tersebut meliputi :

- a. Mengetahui tingkat *likuiditas*, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.

- b. Mengetahui tingkat *solvabilitas*, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, kewajiban keuangan yang dimaksud mencakup keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Mengetahui tingkat *profitabilitas* atau *rentabilitas*, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif.
- d. Mengetahui tingkat *stabilitas*, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil. Kemampuan yang dimaksud diukur dari kemampuan perusahaan membayar pokok hutang dan beban bunga tepat pada waktunya.

2.1.3 Bank Umum Syariah

- a. Bank Umum Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Dalam pengertian lain juga dikatakan bahwa Bank adalah lembaga perantara. keuangan yang biasa disebut *financial intermediary*. Artinya lembaga bank adalah lembaga dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas.

b. Karakteristik Bank Umum Syariah

Direktorat Perbankan Syariah BI menguraikan ada tujuh karakteristik utama yang menjadi prinsip Sistem Perbankan Syariah di Indonesia yang menjadi landasan pertimbangan bagi calon nasabah dan landasan kepercayaan bagi nasabah yang telah loyal. Menurut Muhammad,(2000) ada 7 karakteristik ini adalah :

1) Universal

Memandang bahwa Bank Syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi maupun perbedaan agama.

2) Adil

Memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak menerima serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan dan melarang adanya unsure *maysir, gharar, haram, dan riba*.

3) Transparan

Dalam kegiatannya bank syariah sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

4) Seimbang

Mengembangkan sektor keuangan melalui aktifitas perbankan syariah yang mencakup pengembangan sektor riil dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

5) Maslahat

Bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan

6) Variatif

Produk bervariasi mulai dari tabungan haji dan umrah, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual-beli dan sewa, sampai kepada produk jasa kustodian, jasa transfer, dan jasa pembayaran (*debet card, syariah charge*).

7) Fasilitas

Penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf, danakebajikan (*qard*), memiliki fasilitas ATM, *mobile banking, internet banking* dan interkoneksi antarbank syariah.

c. Jenis-Jenis Bank Umum Syariah

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Perbankan Berdasarkan jenisnya, bank umum syariah dibagi menjadi empat yaitu

a. Dilihat dari fungsinya, Bank Umum Syariah dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Bank Sentral

Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Menurut UU Pokok Perbankan nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri atas: Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Pasar, Bank Desa,

Lumbung Desa, atau Bank Pegawai.⁵⁶ Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UU RI nomor 10 tahun 1998, jenis perbankan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsi menjadi Bank Umum, sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbungan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Perbankan desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Tugas pokok Bank Sentral adalah:

- a) mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah
- b) mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

2) Bank Umum

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika 57 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 58 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 Tentang Bank Pengertian Bank Umum dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. Dengan demikian, dewasa ini di Indonesia terdapat tiga macam bank yaitu bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat

- b. Ditinjau dari segi Kepemilikannya, bank umum syariah jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing.

1) Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Ditinjau dari segi kepemilikan adalah siapa pun yang turut andil dalam

pendirian suatu bank. Kepemilikan bank dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimilikinya.

- a). Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- b). Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- c). Bank Tabungan Negara (BTN)
- d) Contoh Bank DKI

Bank Jateng, dan sebagainya.

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II. Contoh bank pemerintah daerah adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatra Selatan, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD lainnya:

2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Internasional Indonesia:

3) Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh badan hukum koperasi, contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia;

4) Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain : Sumitono Niaga Bank, Bank Merincop, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Inter Pacifik Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, dan Bank PDFCI.

5) Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.

- c. Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, bank umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam. Pengklasifikasian ini berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaianpenilaian dengan kriteris tertentu.

Status bank yang dimaksud adalah:

- 1) Bank Devisa Adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, traveller cheque, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.
- 2) Bank Non-Devisa Adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Sabir, dkk di dalam jurnal analisis yang mereka tulis berjudul “Pengaruh Rasio Kesehatan Bank terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional tahun 2009-2011” berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar. Penelitian ini membahas tentang bagaimana menganalisis pengaruh tingkat rasio kesehatan bank terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dan bank umum konvensional yang ada di Indonesia. Populasi yang digunakan adalah seluruh bank umum syariah dan bank umum konvensional yang beroperasi di Indonesia, dimana sampel diambil menggunakan 4 bank umum syariah dan 4 bank umum konvensional yang dianalisis menggunakan regresi

berganda dan uji beda. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada bank syariah CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA, FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Pada bank umum konvensional CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, BOPO tidak berpengaruh pada ROA, NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA, LDR berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA. Kesamaan penelitian ini adalah rasio yang digunakan pada bank umum syariah serta berupa CAR, BOPO, FDR, NIM, NPF, ROA.

2. Zalpian Rabsya berjudul “Analisis Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah Periode 2010– 2015”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh NPF, ROA, FDR terhadap dana pihak ketiga pada bank umum syariah dengan menggunakan 12 sampel BUS, dengan metode analisis berupa regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan rasio keuangan NPF, ROA, dan FDR mempunyai pengaruh terhadap DPK. Namun secara parsial Rasio FDR berpengaruh negative terhadap DPK. ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap DPK. Artinya jika profitabilitas bank meningkat maka DPK akan meningkat. Kesamaan yang digunakan pada penelitian ini ialah NPF, ROA, FDR.
3. Ulfah Muharramah “Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing

Financing, dan Size Terhadap Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri” penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh CAR, NPF, dan Size terhadap ROA. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif serta data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh CAR terhadap ROA yang disebabkan BSM dalam penggunaan modal lebih berhati-hati dan fokus menjaga likuiditas bank, sedangkan variabel NPF berpengaruh yang negative terhadap ROA, dan Size juga memiliki pengaruh yang negative terhadap ROA.

4. Iwan Fakhruddin dan Tri Purwanti “Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Periode 2010–2013”. Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh rasio bank yang berbasis risiko terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di bank sentral Indonesia. Populasi yang digunakan meliputi semua bank syariah, dengan sampel sebanyak 11 bank syariah. Kemudian data tersebut di analisis dengan regresi berganda. Maka didapat kesimpulan dimana *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Ratio* (NPF), *Operational Efficiency Ratio* (OER), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Quality Of Produktive Activei* (KAP) secara simultan berpengaruh terhadap ROA. NPF berpengaruh negative signifikan terhadap ROA. OER berpengaruh negative signifikan terhadap ROA. KAP berpengaruh negative terhadap ROA.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah sebuah kerangka yang menggambarkan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu kinerja keuangan dilihat dari

rasio profitabilitas dengan menggunakan indikator ROA terhadap CAR, NPF, FDR. Dalam penelitian ini, yang menjadi variable bebas pada penelitian ini adalah CAR, NPF, FDR. Kemudian yang menjadi variabel terikat pada penelitian ini adalah ROA. *Capital Adequacy Ratio* merupakan rasio kesehatan bank yang digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal dari sebuah perusahaan, dimana jika CAR dari sebuah perusahaan semakin besar maka akan semakin besar pula daya tahan perusahaan yang bersangkutan dalam menghadapi penyusutan nilai harta bank yang timbul karena adanya harta bermasalah.

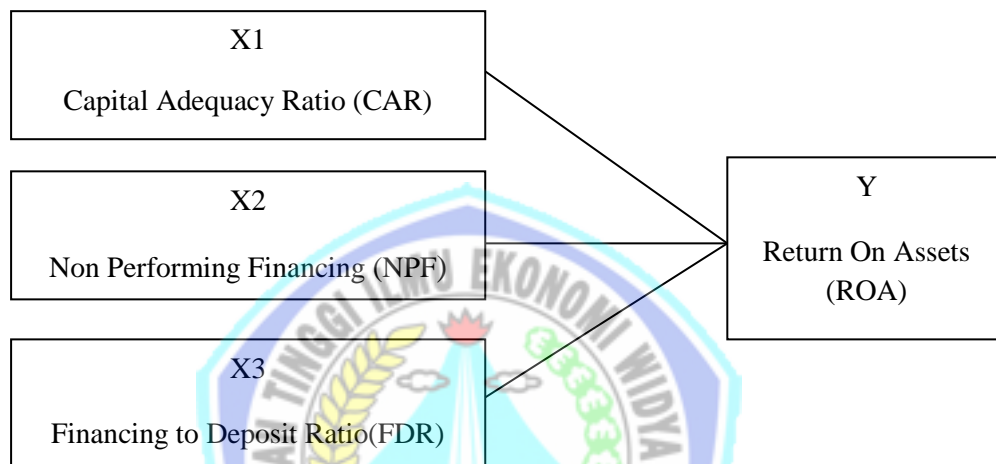
Non Performing Financing merupakan rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menagih dana yang dikucurkan kepada nasabah dan sejauh mana kemampuan nasabah dalam mengembalikan hutangnya terhadap pembiayaan yang diberikan oleh bank, atau pembiayaan bermasalah. Semakin tinggi kredit macet yang ada didalam perusahaan tersebut maka semakin buruk pula kualitas asset yang dimiliki bank dan akan berpengaruh negative terhadap nasabah.

Financing to Deposit Ratio yaitu perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank dan modal bank yang bersangkutan dan dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga.

Return On Assets merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola assetnya untuk mendapatkan laba. Jika sebuah perusahaan dapat dengan baik mengelolanya maka perusahaan akan memperoleh profit yang tinggi. Dengan profit yang tinggi artinya asset yang dikelola bank akan

semakin baik pula. Berdasarkan analisis yang peneliti paparkan sebelumnya, maka pengaruh dari masing–masing variabel tersebut terhadap kinerja keuangan dapat ditunjukkan pada gambar 2.1

Gambar 2.1 Karangka Berfikir



2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, sebelum jawaban secara empirik. Adapun hipotesis yang digunakan peneliti sebagai dugaan sementara meliputi :

1. Hubungan CAR dengan ROA

Capital Adequacy Ratio (CAR) juga biasa disebut dengan rasio kecukupan modal, yang berarti jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup resiko kerugian yang timbul dari penanaman aktiva-aktiva yang mengandung resiko serta seluruh benda tetap dan inventaris bank. Seluruh bank yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8%. Semakin besar CAR maka keuntungan bank juga semakin besar. Dengan kata lain, semakin kecil resiko suatu bank maka semakin besar keuntungan yang diperoleh bank (Kuncoro, 2002:102).

Menurut Iwan Fakhruddin dan Tri Purwanti permodalan dapat menyerap kerugian yang dialami sehingga kegiatan akan efisien yang pada akhirnya laba akan meningkat. Dengan meningkatnya laba, kinerja bank meningkat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semakin besar CAR, maka ROA juga akan semakin besar, dalam hal ini kinerja perbankan akan semakin meningkat atau membaik. Berdasarkan uraian di atas akan diperoleh hipotesis yaitu :

H1 : CAR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA

2. Hubungan NPF dengan ROA

Non Performing Financing (NPF) merefleksikan besarnya resiko kredit yang dihadapi bank, semakin kecil NPF, maka semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memnuhi kewajiban. Bank

melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memerkecil resiko kredit. Dengan demikian apabila suatu bank mempunyai *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi, maka akan memerbesar biaya baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpengaruh terhadap kinerja bank.

Risiko pembiayaan yang tercermin dengan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank yang diproksikan dengan *Return of Assets* (ROA). Sehingga jika semakin besar NPF, akan mengakibatkan menurunnya ROA, yang juga berarti kinerja keuangan bank yang menurun. Begitu pula sebaliknya, jika NPF turun, maka ROA akan semakin meningkat, sehingga kinerja keuangan bank dapat dikatakan semakin baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iwan Fakhruddin dan Tri Purwanti menunjukkan hasil bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA namun tidak signifikan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu :

H2 : NPF memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA

3. Hubungan FDR dengan ROA

Financing to Deposit Ratio (FDR) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Menurut Bank Indonesia Kemampuan likuiditas bank dapat dilihat pada FDR yaitu perbandingan antara kredit dengan dana pihak ketiga. Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga.

Penelitian yang dilakukan Iwan Fakhruddin dan Tri Purwanti memperlihatkan

hasil bahwa FDR berpengaruh positif terhadap ROA. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu :

H3 : FDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA

